

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta perluasan akses pasar global. Indonesia menjadi tujuan menarik bagi investor karena memiliki pasar yang besar, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis yang strategis. Meski demikian, tantangan masih ada, seperti birokrasi yang rumit, kepastian hukum, dan pemerataan infrastruktur yang belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi melalui berbagai regulasi dan reformasi kebijakan. Secara keseluruhan, PMA memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia, namun harus tetap dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan maupun dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam merupakan salah satu kawasan strategis yang dikembangkan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, ekspor, serta penciptaan lapangan kerja. Dengan letak geografis yang sangat strategis karena berdekatan dengan Singapura dan berada di jalur perdagangan internasional, KEK Batam menjadi magnet bagi investor asing maupun domestik, khususnya di sektor industri manufaktur, logistik, pariwisata, dan jasa modern. Kehadiran KEK ini telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan infrastruktur,

peningkatan daya saing industri lokal, serta transfer teknologi yang mendorong Batam semakin dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan internasional. Selain itu, KEK Batam juga membuka peluang besar bagi masyarakat dalam memperoleh lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat tantangan yang harus dikelola dengan baik, seperti ketergantungan pada investasi asing, isu lingkungan, serta pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja global. Oleh karena itu, pengelolaan KEK Batam harus dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga kawasan ini tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

3. Hambatan yuridis dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam banyak dipengaruhi oleh tumpang tindih regulasi yang berlaku, khususnya antara ketentuan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, dengan ketentuan KEK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Dualisme regulasi ini menimbulkan kebingungan terkait fasilitas dan insentif hukum yang berlaku, terutama mengenai pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, serta tata cara kepabeanan.
4. Selain itu, peraturan mengenai kewenangan pengelolaan lahan dan perizinan di

Batam yang melibatkan Badan Pengusahaan (BP) Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 seringkali bertabrakan dengan kewenangan Pemerintah Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan penanaman modal asing (PMA), mengingat Batam merupakan salah satu kawasan dengan keunggulan geoekonomi dan geostrategis di Indonesia. Optimalisasi ini dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain penyederhanaan prosedur perizinan investasi dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta integrasi dengan Online Single Submission (OSS), sehingga investor asing dapat memperoleh kepastian hukum dan kemudahan dalam memulai usaha. Selain itu, BP Batam terus meningkatkan kualitas infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, serta layanan utilitas yang mendukung aktivitas bisnis berskala internasional. Di sisi regulasi, BP Batam juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan fasilitas fiskal dan non-fiskal sesuai ketentuan KEK maupun FTZ, sehingga dapat meningkatkan daya tarik Batam di mata investor asing. Tidak hanya itu, BP Batam mendorong kolaborasi dengan sektor swasta global, memperkuat promosi investasi internasional, serta memastikan adanya kepastian lahan dan perlindungan hukum bagi penanam modal. Dengan optimalisasi tersebut, BP Batam diharapkan mampu menarik lebih banyak PMA yang berorientasi ekspor, mempercepat transfer teknologi, membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas dan manfaat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, pemerintah perlu terus memperkuat iklim investasi dengan menyederhanakan birokrasi perizinan, mempercepat proses administrasi, serta menjamin transparansi dalam setiap regulasi yang berlaku. Kepastian hukum, stabilitas politik, dan keamanan harus menjadi prioritas utama, karena hal tersebut menjadi faktor penentu bagi investor asing dalam mengambil keputusan menanamkan modal.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata, baik di bidang transportasi, energi, maupun teknologi informasi, sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan investasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja lokal dapat terserap dengan baik dan mampu bersaing secara global. Tidak kalah penting, setiap investasi asing harus diarahkan pada prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga memberikan dampak positif bagi generasi mendatang. Lebih jauh lagi, distribusi investasi sebaiknya tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan didorong ke berbagai wilayah lain yang memiliki potensi besar, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung lebih merata. Dengan langkah-langkah tersebut, PMA di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional.

Untuk memaksimalkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, pemerintah bersama pengelola kawasan perlu terus memperkuat infrastruktur pendukung, baik

transportasi, pelabuhan, bandara, maupun jaringan telekomunikasi, agar aktivitas perdagangan dan logistik dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kepastian hukum sangat penting untuk menarik lebih banyak investor asing maupun domestik. Pemerintah juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Batam melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja lokal mampu bersaing dan terserap dalam berbagai sektor. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan di KEK Batam harus berorientasi pada keberlanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar agar pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berdampak positif bagi sosial dan ekologi. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan diversifikasi sektor unggulan, tidak hanya manufaktur, tetapi juga pariwisata, ekonomi digital, serta jasa modern, sehingga Batam memiliki daya tarik investasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, KEK Batam dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia di kawasan barat sekaligus pintu gerbang penting menuju pasar internasional.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan Batam, BP Batam diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor dengan menyederhanakan prosedur perizinan, memperkuat transparansi, serta mempercepat proses administrasi agar iklim investasi di Batam semakin kompetitif. BP Batam juga perlu berfokus pada pembangunan infrastruktur strategis, seperti pelabuhan, bandara, jalan, dan jaringan digital, karena fasilitas yang memadai menjadi faktor penentu kelancaran aktivitas perdagangan dan industri. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan industri juga perlu diprioritaskan agar masyarakat Batam memiliki daya saing yang tinggi dan dapat terserap secara optimal

dalam lapangan kerja yang tercipta. Di sisi lain, BP Batam harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan melalui kebijakan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Diversifikasi sektor usaha, seperti pengembangan pariwisata, jasa modern, dan ekonomi digital, juga penting dilakukan agar perekonomian Batam tidak hanya bertumpu pada industri manufaktur semata. Dengan langkah-langkah tersebut, BP Batam dapat memperkuat posisinya sebagai motor penggerak utama ekonomi daerah sekaligus menjadikan Batam sebagai kawasan strategis yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global.

